



MCP KPK

Ketapang Capai 90

Sosialisasikan Pengadaan Barang dan Jasa

KETAPANG, SP - Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi indikator dalam pengadaan barang dan jasa. Nilai 90 yang diraih Kabupaten Ketapang pada tahun 2023 diharapkan akan meningkat pada tahun 2024.

Data itu diungkap Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Donatus Franseda ketika membuka Sosialisasi Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Kamis (26/9).

Kegiatan ini diadakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Ketapang dengan menghadirkan pemateri dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pj Sekda Franseda mengatakan, kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti indikator pada MCP KPK, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.

"Saya berharap setelah

kegiatan sosialisasi ini ada capaian output yang dihasilkan, yaitu berupa tercapainya upaya konsolidasi pengadaan untuk belanja barang dan jasa rutin perangkat daerah melalui etalase hasil konsolidasi pada e-Katalog lokal Kabupaten Ketapang," harapnya.

Dia menjelaskan, konsolidasi ini merupakan strategi pengadaan barang dan jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang dan jasa sejenis, baik pada belanja modal maupun belanja barang dan jasa yang bersifat rutin.

"Konsolidasi dilakukan agar dapat mengurangi biaya proses pengadaan, meningkatkan efisiensi belanja, meningkatkan pemberdayaan industri dalam negeri serta untuk memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*)," ungkapnya.

Pelaksanaan konsolidasi pengadaan juga merupakan amanat dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 khususnya Pasal 21, dan Surat Keputu-

san Kepala LKPP Nomor 121 Tahun 2023.

"Sosialisasi ini merupakan saat yang tepat untuk kita berdiskusi nanti pada saat penyampaian materi dari narasumber untuk menciptakan pemahaman bersama, sehingga setelah sosialisasi diharapkan dapat dilaksanakan diskusi antara UKPBJ dengan APIP yang difasilitasi LKPP yang akan dilaksanakan nanti siang setelah kegiatan sosialisasi ini," paparnya.

Nilai MCP KPK Kabupaten Ketapang, khususnya untuk pengadaan barang dan jasa tahun 2023 sudah mencapai nilai 90 dan diharapkan akan meningkat pada tahun 2024 ini.

"Untuk meningkatkan nilai tersebut kita harus melaksanakan konsolidasi pengadaan dan tender dini. Untuk itu, mohon kerja sama dari semua perangkat daerah dalam mendukung pencapaian indikator MCP KPK dalam pengadaan barang," pesan Franseda.

Sementara itu, Kepala



IST

SOSIALISASI - Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Donatus Franseda menyampaikan kata sambutan ketika membuka Sosialisasi Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Kamis (26/9).

Bagian LPSE Setda Ketapang, Sudirman Sinaga, mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan

gan Pemerintah Kabupaten Ketapang, termasuk pelaksanaan konsolidasi PBJ pada katalog elektronik lokal.

“Konsolidasi PBJ merupakan salah satu indikator MCP KPK yang dimonitor setiap tahun,

termasuk pelaksanaan tender atau lelang dini setiap tahun diukur atau dipantau dari setiap kabupaten dan kota, termasuk provinsi,” katanya.

Konsolidasi PBJ, lanjutnya, merupakan amanat

dari Perpres 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, yaitu mengatur salah satu ketentuan tentang pelaksanaan konsolidasi yang segera dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan dan direalisasikan. (teo/*)